

## **Peran Pemerintah Lokal Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Desa Adean Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah**

<sup>1)</sup>**Wahyuna H. Maida, <sup>2)</sup>Hendro Wardhono**  
<sup>1)2)</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo  
Email: yunayunaa56@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pokok dari pada permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Peran pemerintah lokal dalam memperdayakan petani cengkeh di Desa Adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah? 1)Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung peran pemerintah lokal dalam Memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah? 2)Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung peran pemerintah lokal dalam Memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah? 3) Rekomendasi kebijakan apakah yang dapat di rumuskan agar dapat meningkatkan kapasitas peran pemerintah lokal dalam memperdayakan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut sulawesi tengah.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian ini adalah field reseach (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan prosedur analisis. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di desa adean kabupaten banggai laut Sulawesi tengah. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah Wawancara, observasi, dan dokumentasi. Prosedur analisis data dari penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah sudah menjalankan tugasnya untuk memberdayakan masyarakat dengan mengadakan pelatihan serta penyuluhan, pemerintah juga membagikan sejumlah bibit cengkeh kepada para petani, tidak hanya itu, petani juga di ajarkan cara membuat pupuk, cara pemupukan, pengendalian hama dan penyakit.

Adapun Saran yang di ajukan dalam rangka Penyelesaian permasalahan tersebut yaitu, pemerintah bisa lebih Terfokus untuk mengupayakan kesejahteraan petani cengkeh dengan cara membuat lagi berbagai strategi atau konsep pertanian secara Kukuh atau mantap karena semakin meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan petani cengkeh maka perkembangan produksi cengkeh akan meningkat.

**Kata kunci : Pemberdayaan, pemerintah, Cengkeh, petani**

### **ABSTRACT**

*The main problem of this research is how is the role of local government in empowering clove farmers in Adean Village, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi? 1) What are the factors that hinder and support the role of local government in empowering clove farmers in Adean Village, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi? 2) What are the factors that hinder and support the role of local government in empowering clove farmers in Adean Village, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi? 3) What policy recommendations can be formulated in order to increase the capacity of the local government's role in empowering clove farmers in Adean Village, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi? The type of this research is this research is a field research (field research) using a qualitative approach, namely research that is descriptive and uses analytical procedures. The location of this research is in Adean Village, Banggai Laut Regency, Central Sulawesi. Data collection methods used are interviews, observation, and documentation. The data analysis procedure of this research is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the government has carried out its duties to empower the community by holding training and counseling, the government also distributes a number of clove seeds to farmers, not only that, farmers are also taught how to make fertilizer, how to fertilize, control pests and diseases. The suggestions put forward in the context of solving these problems, namely, the government can be more focused on seeking the welfare of clove farmers by making again various strategies or agricultural concepts in a firm or steady manner because the productivity and welfare of clove farmers will increase, the development of clove production will increase.*

**Keywords : empowerment, government, clove, farmer**

## A. LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, hal ini juga memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk mendapatkan pendapatan dari kelimpahan kekayaan hayati itu sendiri. Kemajuan dunia menuju arah globalisasi dalam segala bidang kehidupan yang mencakup beberapa bidang termasuk pemerintahan, inovasi, pertanian, sosial dan budaya, telah membawa banyak efek, baik konsekuensi positif maupun negatif, globalisasi dapat memacu kemajuan yang sangat cepat pada peningkatan kualitas perkembangan negara. Selain itu, Indonesia juga terkenal dengan tanahnya yang subur sehingga di mana pun Anda menanam tanaman, dapat tumbuh dengan subur.

Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Ini menyiratkan bahwa pertanian adalah bidang utama yang mencatat hampir setengah dari perekonomian. pertanian juga memiliki peran nyata dalam perdagangan asing melalui pengiriman. Dengan cara ini, penting untuk di adakan pembangunan sektor pertanian sehingga, dapat bersaing di sektor bisnis lokal dan asing. Pembangunan pertanian di Indonesia tetap menjadi yang paling penting, terutama di daerah-daerah pedesaan karena pertanian telah menjadi penyalur ekonomi masyarakat yang perkembangannya benar- benar meluas, sementara berbagai daerah mengalami perkembangan negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia adalah (1) potensi kekayaan yang sangat besar dan beragam, (2) porsi pendapatan masyarakat yang sangat besar, (3) banyaknya individu yang bergantung pada daerah ini. untuk kehidupan mereka, (4) menjadi basis pembangunan di daerah provinsi.

Membahas kemajuan yang ada di masyarakat adalah sesuatu yang harus

dipikirkan, oleh karena itu, setiap orang pasti membutuhkan lingkungan yang baik untuk masa depan nya agar menjadi sejahtera dan lebih baik kedepannya, karena pencapaian kesuksesan dalam kehidupan individu, semakin banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi Oleh karena itu, dengan adanya sumber daya yang mungkin dapat mengatasi masalah kehidupan individu.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Konsep Peran Pemerintah

Peran berarti suatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Gunawan, 2003) peran juga dapat di jelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula di pinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang di sandang untuk di bawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama. Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang di bawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. terdapat teori peran yang mengatakan bahwa peran atau "role" sebagai *the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization's boundaries* (Banton, 1965; Katz & Kahn, 1966, dalam Purwanto, 2003) Soerjano Soekanto (2002) menjelaskan bahwa peran adalah suatu aspek dinamis yang (status), kedudukan nya jika individu menjalankan kewajiban dan hak nya yang sama dengan kedudukannya, dari situ maka bisa di katakan individu itu

telah melaksanakan suatu peranan. Selain itu juga ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa teori peran ini memberikan suatu cara di dalam pelajaran perilaku di dalam organisasi, yang memberitahukan bahwa peran ini telah melibatkan pola prodk yang telah diciptakan sebagai lawan dalam tindakan atau perilaku. Dougherty & Pritchard (1985) dalam Purwanto (2003), ada beberapa syarat-syarat peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2022) yaitu:

1. Di dalam peran terdapat norma-norma yang telah dihubungkan berdasarkan tempat seseorang atau posisi dalam suatu masyarakat. Dalam artian ini menyiratkan serangkaian aturan-aturan yang membimbing seseorang untuk kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran yaitu sesuatu yang menyiratkan tentang perilaku yang bisa di lakukan oleh individu di dalam suatu organisasi masyarakat.
3. Peran ini bisa juga di katakan sebagai individu yang memiliki perilaku yang penting bagi struktur sosial di dalam masyarakat. J. dwi narwoko dan bagong suyanto (2010) juga menjelaskan bahwa suatu hal yang bisa membimbing orang tersebut di dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Penetapan hak suatu tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.

Mengoperasikan suatu cara penanggulangan serta mengontrol, agar bisa melindungi kehidupan di dalam masyarakat. Serta di ketahui melalui

aspek pemerintahan kata pemerintah atau pemerintahan keduanya di sebut berawal dari kata “perintah” yang merupakan sesuatu yang mesti di wujudkan. Pada saat kata itu terbilang tergabung di sebagian komponen serta membentuk khas dari kata “perintah” terdapat “keharusan” yang membuktikan komitmen agar mewujudkan sesuatu yang di arahkan. Terdapat dua aspek yang membagi dan yang mendapatkan perintah. Terdapat ikatan yang di sesuaikan antara yang membantu dan yang mendapatkan perintah. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah “Pemerintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa inggris di pergunakan kata “government” Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang di lakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri.

## 2. Desentralisasi Dan Pemerintah Daerah

Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerah nya sendiri Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan urusan pemerintahan antar pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintah tergantung pada kemungkinan bahwa secara konsisten terdapat urusan pemerintah yang berbeda yang sepenuhnya/terjaga berada di bawah kekuasaan atau wewenang pemerintah. Terjaminnya urusan pemerintah yang menyangkut kelangsungan hidup bangsa serta Negara secara keseluruhan. konsep desentralisasi telah di tafsirkan berbeda-beda di berbagai Negara dan keanekaragaman politik dan ekonomi serta alasan administrative telah di kemukakan untuk

menetapkan prosedur perencanaan desentralisasi. Dalam konteks hubungan antar pemerintah, Rondenelli mengemukakan bahwa “desentralisasi berarti pemindahan atau penyerahan perencanaan, membuat keputusan atau otoritas manajemen dari pemerintah pusat dan perwakilannya kepada organisasi lapangan, unit-unit pemerintahan yang lebih rendah, badan hukum public, penguasa wilayah luas maupun regional, para ahli fungsional, ataupun kepada organisasi non pemerintah.” Tipe desentralisasinya di tentukan oleh luasnya pemindahan kekuasaan dan susunan institusional yang di gunakan dalam proses. Empat bentuk desentralisasi dapat di pergunakan oleh pemerintah dalam perencanaan dan administrasi pemindahan kekuasaan :

1. Dekonsentrasi melibatkan pemindahan (transfer) fungsi dan kekuasaan pembuatan keputusan di dalam hirarkhi pemerintah pusat, melalui pengalihan beban kerja dari kementerian-kementerian pusat kepada para pejabat di lapangan, penciptaan lembaga- lembaga lapangan atau pengalihan tanggung jawab kepada unit-unit administrative lokal yang di control dari pusat.
2. Delegasi pada lembaga-lembaga semi otonom atau otonom melibatkan transfer fungsi-fungsi kepada organisasi non pusat, khususnya unit-unit pelaksana proyek dan kekuasaan regional atau fungsional pembangunan, juga menjadi andalan dalam berproses di luar aturan pemerintahan pusat serta dapat melakukan sesuatu di dalam organisasi nasional agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah diuraikan.
3. Defolusi melibatkan transfer fungsi atau kekuasaan pembuatan

keputusan dari pemerintah pusat ke pemerintah Lokal.

4. Transfer pada lembaga swadaya masyarakat merupakan proses pemindahan tanggung jawab untuk fungsi-fungsi dari sector swasta kepada organisasi non pemerintah.

Dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tujuan pertama desentralisasi adalah untuk mewujudkan political equality (kesetaraan politik) melalui pelaksanaan keinginan di dalam desentralisasi untuk bertambah dalam mengungkapkan kesempatan untuk masyarakat agar ikut serta pada saat berbagai ragam kegiatan politik di tingkat lokal. Masyarakat di daerah, tulis smith (1985). Tujuan kedua desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah local accountability (pertanggung jawaban) melalui pelaksanaan desentralisasi di harapkan dapat tercipta peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak komunitasnya, yang meliputi hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah, serta hak untuk mengontrol pelaksanaan pemerintah daerah. Tujuan ketiga desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah local responsiveness (daya tanggap) asumsi dasar dari tujuan desentralisasi untuk yang terakhir ini yaitu lantaran pemerintah daerah di duga lebih paham mengenai permasalahan yang menghadang kelompoknya, penerapan desentralisasi membentuk suatu jalan yang baik dalam menangani permasalahan serta sekalian memajukan pembangunan sosial suatu ekonomi di daerah tersebut.

### **3. Tugas Dan Fungsi Pemerintah**

Kehadiran dan keberadaan pemerintah di maksudkan untuk

melayani masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Asal usul mengungkapkan bahwa perorangan, kendati sekecil kelompoknya, apalagi seumpama individu sekali pun, mengharapkan layanan pemerintah. Dengan cara ini, rutinitas individu secara tegas di defensisikan berkaitan dengan fungsi pemerintah. Pemerintahan merupakan penerapan dalam melaksanakan kewajiban pemerintah, sementara itu pemerintah merupakan bagian yang melaksanakan pemerintahan untuk itu bersamaan dengan yang di kemukakan Ridwan HR (2002) yang menyatakan pemerintah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di suatu negara dan bertugas untuk mengelolah system pemerintahan dalam mencapai tujuan Negara. Fungsi pemerintahan yang di laksanakan pemerintah dalam hal ini adalah “Tugas” yang berkaitan dengan jabatan public. Pengertian ini merujuk pada tugas-tugas pemerintahan yang di laksanakan pemerintah dalam hal ini adalah “tugas” yang berkaitan dengan jabatan public. Pengertian ini merujuk pada tugas-tugas pemerintahan yang di laksanakan oleh pejabat public dari tingkat pusat sampai pada tingkat daerah.

Memasuki abad ke 20 fungsi pemerintah semakin banyak di minati oleh ilmuan sosial, politik, dan pemerintahan, hasil penelusuran berbagai literature menyuguhkan fakta baru bahwa kajian mengenai fungsi pemerintahan semakin banyak di tekuni. Untuk itu, ada beberapa penilaian yang di anggap delegasi dan dapat di percaya yang berlaku dalam memperhatikan unsur-unsur pemerintahan, fungsi pemerintah dalam pandangan Ryaas sebenarnya

harus di tambah. Ilmuan sosial Luer, mengatakan ada tiga elemen pemerintah. Pertama, pemerintah berperan menciptakan kondisi yang mudah dalam pembangunan ekonomi tetapi tidak berperan aktif. Pendekatan ini dapat berarti, misalnya memberikan jaminan kestabilan sosial serta mendukung berbagai macam pembangunan perdagangan dan industry yang telah di lakukan pengusaha swasta. Kedua, pemerintah secara aktif mengatur proses pembangunan hingga taraf tertentu. Misalnya, berbagai kelompok kepentingan mungkin memerlukan perlindungan dalam hal tertentu sehingga mereka tidak di kalahkan oleh kelompok yang lain yang lebih kuat, dengan demikian, suasana kondisi tetap terjaga. Ketiga, secara langsung pemerintah ikut serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi melalui mekanisme seperti nasionalisasi cabang-cabang industry tertentu, spesifikasi prioritas dan tujuan nasional, dan menetapkan berbagai jenis sumber daya yang penting bagi pembangunan (Lauer, 2003) perbedaan fungsi pemerintah sebagaimana yang di utarakan Ryaas dan lauer Nampak jelas berbeda ryaas memberikan tekanan fungsi pemerintahan sangat bernuansa politik pemerintahan, sedangkan Lauer mengarah pada pembangunan ekonomi. Fungsi pemerintahan yang banyak itu government yang kuat. Sebab hanya dengan pemerintahan yang kuat semua fungsi-fungsi pemerintahan bisa di laksanakan dengan baik sesuai dengan konsitusi. Secara konseptual government yaitu nama yang telah diberikan buat sesuatu yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan di suatu Negeri. System pemerintahan hirarkis mengharuskan terjadi koordinasi yang berjenjang dari pusat sampai ke desa. Kapasitas bertindak pemerintahan tidak terbatas



pada penyedia layanan public, tetapi juga memecahkan persoalan besar seperti isu kemiskinan, perombakan ekonomi, mengurangi pengangguran, kerusakan lingkungan serta kerja sama dengan aktor-aktor di luar pemerintahan.

#### **4. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep merupakan abstraksi atau ide yang dapat di gambarkan tentang mental yang di buat dalam suatu symbol maupun kata. Secara bahasa, pemberdayaan atau kekuasaan berasal dari kata power yang berarti keberdayaan atau kekuasaan. Konsep pemberdayaan di mulai dari penguatan modal sosial di individu atau kelompok yang menggabungkan penguatan modal sosial, mematuhi aturan, dan organisasi, modal sosial yang solid sehingga akan mudah bagi kita untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan masyarakat serta mudah memberikan ilmu pengetahuan pada masyarakat. Konsep pemberdayaan di kembangkan sekitar Tahun 1970-an yang bermula adanya kesenjangan, kepentingan kekuasaan di antara segmentasi (Lapisan) masyarakat satu dengan lain sehingga muncul pemikiran bagaimana mengatasi fenomena tersebut (Najiyati, asmana dan suryadiputra, 2005). Konsep pemberdayaan menurut pranarka dan priyono (ed). (1996) mencetuskan pemikiran (pemahaman) dari semua itu maka dapat di pahami bahwa konsep pemberdayaan tidak terlepas dengan sebuah gerakan pemikiran untuk bangkit dari ketidakberdayaan (ketidakmampuan).

Paulin Conroy dalam craig and mayo (1995) mengungkapkan di lema di sekitar pemberdayaan masyarakat eropa yang terpisah-pisah oleh adanya kelas-kelas sosial. Pemisahan dan perbedaan

kelas ini termasuk juga dalam klasifikasi warga Negara eropa dan non eropa. Di Negara- negara dunia ketiga, hal tersebut berkembang dalam jangkauan dan skala yang sangat luas. Pasar bebas strategi neo liberal yang pada akhir 1970-an mengembangkan pembangunan ekonomi yang di harapkan ada dampak masyarakat dalam membantu orang miskin (hikmat,2006) istilah empowerment (pemberdayaan) tidak terlepas dari istilah development (pembangunan). Menurut aziz (2005) dalam (kunsadi 2006) dengan adanya planning (perencanaan), (pelaksanaan) (kebijakan dari pemerintah untuk rakyat), sedangkan pemberdayaan cenderung menekankan aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Isu-isu pemberdayaan menjadi wacana public ketika kebijakan pembangunan kurang atau belum mampu berkontribusi secara adil dan merata pada seluruh masyarakat dalam mengakses sumber daya dan fasilitas lainnya.

Pemberdayaan tidak kaku yang mengikuti kebutuhan atau permasalahan satu dengan lainnya. Pemberdayaan merupakan proses memberikan daya/kekuasaan pada sesuatu yang lemah serta membatasi kekuasaan terhadap golongan yang terlalu berkuasa hingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003) Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untk menjadikan kelompok produktif untk mencapai kesejahteraan sosial. dana sosial yang kuat bisa mendukung di dalam keberlanjutan untuk mendirikan rasa kepercayaan terhadap suatu masyarakat tertentu yaitu anggota yang terdapat di dalam kelompok. Untuk itu pemberdayaan bersentuhan dengan rencana mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan sering kali di kaitkan dan di hubungkan dengan

kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat kelompok tersebut. Menurut Sukirno (2013) paradigma baru pembangunan di daerah adalah pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, termasuk petani dan buruh tani, melalui penyedia fasilitas dan prasarana public, pengembangan system agribisnis, industry kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, guna memanfaatkan potensi keunggulan sumber daya alam.

Pada dasarnya pemberdayaan di letakan pada kekuatan tingkat individu dan tingkat sosial yang mengacu pada kemampuan individu, terutama kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka benar-benar memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi :

1. Kebutuhan dasarnya Masyarakat sudah pasti memiliki kebutuhan dasar, sehingga mereka dapat memiliki satu kebebasan dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kemiskinan, bebas dari keodohan dan juga bebas dari kesakitan.
2. Menjangkau segala sumber produktif Dengan adanya sumber yang produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan segala sumber produktif yang memungkinkan agar dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh kebutuhan barang-barang dan jasa segala sumber produktif yang memungkinkan agar dapat meningkatkan pendapat nya dan memperoleh kebutuhan barang-barang dan jasa.

3. Mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi. Pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat bukan sebatas teori saja, tetapi bagaimana mengembangkan suatu daerah pedesaan dan tetap memiliki arti dan kemungkinan untuk berkembang berada di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang menuju Negara maju. Sebelum menjadi Negara maju, tidak dapat di pisahkan dari (SDM) terutama tercermin dari pemerintah dan masyarakat dalam bersinergi untuk meningkatkan menjadi bangsa dan Negara yang baik dan lebih maju. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat di Indonesia adalah masyarakat pertanian, ini menyiratkan bahwa daerah setempat bermata pencaharian sektor pertanian secara umum (pertanian, budidaya, nelayan/perikanan, peternakan, perkebunan, dan Lainnya). Meskipun demikian dalam peningkatan masyarakat sektor pertanian memiliki kemampuan yang sangat beragam, kecenderungan wilayah lokal di pedesaan masih kurang ideal dalam mendominasi hasil proses dan kemajuan saat ini. Untuk itu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memperdayakan petani tersebut.

Pemberdayaan petani berperan penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Sebelumnya Dalam program-program pemerintah mencakup dalam hal pembiayaan untuk memperluas serta meningkatkan kesejahteraan petani. Program pemberdayaan ini di lakukan dengan cara memperdayakan petani yang



diberi kepercayaan penuh sebagai pengelolah kegiatan. petani akan merancang, menentukan topic yang akan di tangani, penyusunan dan pengajuan proposal, penganggaran dana, memilih narasumber, melaksanakan kegiatan, mengontrol dana melakukan pelaporan kegiatan pembelajaran. Petani akan di perkenalkan dengan system penyuluhan yang akan di awasi oleh petani itu sendiri. pelaksana pemberdayaan masyarakat pertanian tidak bisa dipisahkan dari sudut pandang yang vital mulai dari (1) hakikat pemberdayaan, (2) pemberdayaan sebagai kemajuan kawasan lokal (3) prinsip- prinsip dan pendekatan pemberdayaan, (4)teknik pemberdayaan, (5) strategi dan proses pemberdayaan, (6) pendampingan pemberdayaan masyarakat, (7) partisipasi masyarakat, (8)penguatan pengecekan dan penilaian pemberdayaan.

Dari sudut pandang ini merupakan pedoman bagi fasilitator atau pihak yang akan memperdayakan masyarakat petani, mulai dari individu, kelompok, masyarakat itu sendiri dan pemerintah pusat hingga daerah. Dari Semua aspek tersebut dapat di tindak lanjuti oleh fasilitator atau individu yang terkait di dalam pemberdayaan masyarakat pertanian. pada umumnya fasilitator memperdayakan masyarakat pertanian dengan cara perencanaan program atau kegiatan yang pengelolannya di atur oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Program pemerintah dalam memperdayakan petani sebelumnya tentang pembiayaan untuk memperluas serta meningkatkan produksi pertanian, kemudian pihak pemerintah hanya memberikan dana untuk meningkatkan produksi tanpa adanya pemberdayaan untu meningkatkan kesejahteraan petani.

Keberlanjutan program ini tentu perlu di perhatikan lagi dalam keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan

sosial, keberlanjutan ekonomi misalnya petani mamapu mempertahankan produksi dan harga yang optimal dalam kebutuhan ekonomi petani itu sendiri. Keberlanjutan sosial artinya petani secara individu, kelompok dan bermasyarakat mampu bekerja sama, berinteraksi dan saling menguatkan satu sama lain dan terus menerus. Proses pemerdayaan menurut widjajanti (2011) merupakan akses secara menyeluruh dan berkaitan masyarakat yang kooperatif dalam penentuan masalah, rencana, pelaksanaan dan evaluasi secara bersama. Pemberdayaan partisipatif ini memiliki arti baik fasilitator dan peserta (masyarakat) terlibat aktif dalam menggerakkan atau merencanakan, membuat program atau solusi bersama-sama menerapkan program tersebut dan sama- sama mengontrol dan mengevaluasi program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat artinya tipe atau jenis atau desain pemberdayaan yang melandasi program pemberdayaan masyarakat untuk di lakukan oleh fasilitator/pemdamping. Adapun model-model pemberdayaan masyarakat menurut aziz, suhartini, dan halim (2005) antara lain :

1. Model pemberdayaan berbasis padar karya agrobisnis (PKA) Model ini menekankan pada jumlah tenaga kerja atau wirausaha yang bergerak dalam bidang agrobisnis . misalnya adanya kerja sama antara buruh atau petani dengan pedagang kecil, buruh tani mendapat upah dari petani (juragan) kemudian buruh membeli keperluan ke pedagang di sekitar desa. Atau kelompok tani membuat cabang usaha baru yaitu persediaan dan penjualan pupuk kompos atau bokashi, kelompok tani memerlukan tenaga buruh dalam pembuatan pupuk bokashi/kompos setelah itu petani membeli pupuk tersebut.

2. Model pemberdayaan berbasis grup usaha produktif Model ini menekankan pemberdayaan pada grup usaha yang produktif. Misalnya fasilitator memfasilitasi bantuan dana atau uang tunai ke petani atau kelompok tani dalam membuka usaha sampingan (olahan hasil pertanian) usaha ini di namakan hal yang produktif
3. Model pemberdayaan berbasis sentra peningkatan agrobisnis komoditi unggulan. Model ini menekankan pada adanya pusat pengembangan agrobisnis yang menunjukkan komoditas unggulan. Baik di gerakan oleh kalangan pesantren. Atau pihak yang terkait (yang membutuhkan model ini) petani juga mampu dalam model pemberdayaan ini.
4. Model pemberdayaan berbasis perguliran ternak atau pinjaman dana. Model ini menekankan pada pada proses bergulirnya pinjaman dana yaitu petani sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman. konsep pemberdayaan sejauh ini masih mengarah pada pembangunan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan.

## 5. Tujuan Pemberdayaan

Yang ingin di capai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian ini meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Pemberdayaan bertujuan yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari jebakan kemiskinan dan

keterbelakangan. Pemberdayaan memiliki empat prinsip utama yang di kemukakan oleh najiyati, asmana dan suryadiputra (2005) sebagai berikut :

1. Kesetaraan Lembaga atau organisasi yang melakukan sebuah program pemberdayaan harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip kesetaraan, karena hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam pemberdayaan. Prinsip kesetaraan tidak mengenal status atau kedudukan seseorang seperti buruh tanam perempuan dengan juragan, atau petani dengan buruh tani. Oleh karena itu, antara petani yang di berdayakan dengan penyuluh atau pembina yang memberdayakan memiliki kedudukan yang sama. Hal ini memiliki makna memahami kelebihan dan kelemahan satu sama lain dan menumbuhkan kenyamanan di antara semua berkenan relasi kerja missal dalam sektor pertanian.
2. Partisipatif Program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, di rencanakan, di laksanakan, di awasi dan di evaluasi oleh masyarakat itu sendiri, berpotensi besar dan meningkatkan kemandirian dirinya sendiri. Program pemberdayaan biasanya mampu terlaksana dengan baik, namun tidak dapat berlanjut, karena tidak adanya keterlibatan anggota/partisipan dengan pemberdaya (fasilitator) dalam mengembangkan potensi petani. Masyarakat yang di berdayakan selama ini di abaikan keterlibatannya oleh pemerintah mereka hanya di jadikan objek pemberdayaan melalui bantuan secara langsung, tanpa dilibatkan untuk berpartisipasi dalam tahap perencanaannya. Hal tersebut ternyata tidak mampu membentuk masyarakat menjadi mandiri, dan

hanya menjadikan masyarakat semakin bergantung kepada bantuan-bantuan yang di berikan.

3. Keswadayaan/kemandirian. Merupakan hal penting dalam mengembangkan potensi atau kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain merupakan bentuk dari prinsip keswadayaan. Panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat adalah berupa prinsip Mulailah dari apa yang mereka punya. Bantuan teknis yang hendak diberikan oleh fasilitator sebaiknya memperhatikan potensi dan manfaat dari bantuan tersebut, apakah bantuan ke petani dapat di manfaatkan, dan membawa dampak positif lainnya atau tidak.
4. Keberlanjutan Pemberdayaan bersifat berkelanjutan, artinya pemberdayaan yang secara berjalan terus menerus meskipun ada dominasi pendamping (pemberdaya) pada tahap awal program masih tinggi, akan tetapi secara bertahap di harapkan masyarakat mampu mengendalikan programnya lebih lanjut. Kegiatan pemberdayaan yang tidak berlanjut biasanya hanya meninggalkan bentuk bangunan fisik sebagai jejak bahwa program tersebut pernah di terapkan di daerah tersebut. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat membuat mereka terpaksa menerima sebuah program yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga program tersebut tidak dapat berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat dapat di laksanakan berdasarkan beberapa prinsip DuBois dan Miley (1992) yang menyatakan beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat antara lain :

1. Prinsip relasi dalam relasi pertolongan, artinya hubungan antar sesama ini meliputi empati, saling memahami, adanya perbedaan atau ciri khas anggota serta mengutamakan kerja sama di antara anggota atau partner lainnya.
2. Prinsip komunikasi, artinya senantiasa saling hormat, menerima perbedaan, menekankan anggota dan menjaga satu sama lain terutama rahasia.
3. Prinsip pemecahan masalah, artinya dalam pemberdayaan masyarakat sebaiknya fasilitator ataupun partisipan senantiasa memecahkan masalah, meskipun pemecahan masalah bervariasi, menghargai perbedaan solusi, saling memberi kesempatan berpendapat dan bertanggung jawab akan keputusan dan evaluasi.
4. Prinsip refleksi sikap dan nilai profesi, artinya seseorang fasilitator atau partisipan senantiasa bersikap profesional dan sikapnya di jaga, tidak diskriminasi dan menjaga kesetaraan atau keadilan.

Pentingnya pendekatan pemberdayaan masyarakat ini tidak terlepas dengan siapa yang akan melakukan pemberdayaan. Pada sektor pertanian terdapat PPL dalam petani ataupun buruh tani. Tentu strategi pendekatan pemberdayaan ini akan sangat penting bagi PPL (petugas penyuluh lapangan) hal ini akan menyesuaikan dengan pandangan buruh tani dalam memandang pendekatan pemberdayaan seperti kegunaan pendekatan pemberdayaan tersebut, sehingga tingkat kepentingan akan sebuah pendekatan pemberdayaan petani ini terletak pada kebutuhan dan orientasi masing-masing pihak atau instansi yang terkait dalam bidang ini. pemberdayaan masyarakat ini proses peningkatan proses kemandirian dalam mengembangkan

kualitas manusia khususnya di sini petani sebagai subjek dan objek. Petani dan fasilitator memiliki kesamaan tujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga mereka menggali potensi yang di miliki, kemudian mengajukan kegiatan-kegiatan yang di rancang dan memiliki peluang atau celah untuk mengatasi masalah ini. jika kegiatan atau program yang secara terus-menerus dalam mengembangkan kualitas hidup (tujuan kesejahteraan). Pemberdayaan juga sebuah pendekatan yang relative baru dalam menggerakkan dan mengubah masyarakat sehingga perubahan masyarakat. Sehingga perubahan masyarakat di mulai dari yang berdasarkan skala prioritas, artinya jika masalah masyarakat pada aspek individu maka di selesaikan secara individu namun jika masalah yang di hadapi pada aspek aturan atau kebijakan tingkat desa atau Negara maka yang perlu di ubah adalah aturan atau kebijakan tersebut. Menurut Dwiyanto dan jemadi (2003) terdapat beberapa tigtakan dari pemberdayaan yaitu skala mikro, skala mikro berarti pemberdayaan berada pada lingkungan sekitar tempat tinggal atau desa masyarakat.

### C. METODE PENELITIAN

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah field reseach (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan prosedur analisis. Makna dan proses lebih di tunjukan dalam penelitian kualitatif, landasan teori di manfaatkan sebagai sumber pemandu agar fokus penelitian terarah, dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sebagaimana penulis melakukan penelitian nantinya di desa

adean kabupaten banggai laut Sulawesi tengah.

#### b. Fokus Penelitian

1. Peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh khususnya dalam upaya melakukan pemberdayaan melalui program-program pemerintah di lintas instansi/OPD.
2. Faktor- faktor yang menghambat dan mendukung peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh, baik dalam lingkup internal maupun eksternal.
3. Rekomendasi kebijakan yang di dasarkan atas telaah teoritik dari teori-teori administrasi public yang relevan dan temuan-temuan penelitian.

#### c. Prosedur Pengumpulan Data

##### i. Wawancara

Wawancara Adalah suatu pertemuan antara individu satu dengan individu lainnya baik berupa kelompok ataupun individu untuk melakukan pertanyaan tanya jawab antara pewawancara dengan yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang relevan mengenai suatu masalah yang akan di teliti. Wawancara yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah tanya jawab oleh pewawancara dengan para informan yang telah di pilih guna mendapatkan data yang di perlukan. Di dalam wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala Bidang, penyuluh, sekretaris desa dan masyarakat Petani cengkeh.

##### ii. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data yang di peroleh dalam observasi di catat. Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan bagian dari pada kegiatan pengamatan. (Nurkencana, 1986). Observasi ini di lakukan secara langsung

di lapangan guna mengetahui peran pemerintah dalam memperdayakan petani cengkeh di Desa Adean. Untuk itu, Observasi yang di lakukan di dalam penelitian ini yaitu peneliti mengamati di sekitar lingkungan dari awal penelitian hingga selesai. Penulis menggunakan teknik ini agar bisa mengetahui kondisi sekitar masyarakat sehingga peneliti bisa lebih mudah memperoleh data yang di butuhkan.

### iii. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang di gunakan untuk memperoleh data dan Informasi dalam bentuk buku, arsip, document, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, dokumentasi di gunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaah. Sugiyono (2015: 329). Berikut Dokumentasi yang di gunakan dalam penelitian ini yakni, dokumentasi yang berbentuk gambar atau foto yang di peroleh pada saat peneitian berlangsung.

### d. Prosedur Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang di ambil saat melakukan penelitian dengan memproses data menjadi informasi dan menganalisis suatu data agar mudah di pahami. Menurut Lexy J. Moleong teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang di kerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrument penelitian seperti catatan, document, hasil test, rekaman, dan lain-lain sehingga di peroleh kesimpulan. Di Dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan model interaktif dari miles dan huberman untuk menganalisis hasil penelitian. Aktifitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara terus menerus sampai tuntas, Pengumpulan data baik dari observasi secara langsung kemudian di lakukan wawancara kepada informan yang telah

di pilih agar memperoleh data yang sesuai yang di harapkan.

- a. Pengumpulan data baik dari observasi secara langsung kemudian di lakukan wawancara kepada informan yang telah di pilih agar memperoleh data yang sesuai yang di harapkan.
- b. Reduksi data. Reduksi data adalah suatu data yang di peroleh di lapangan yang hasilnya Bisa Banyak, seorang peneliti diwajibkan dengan teliti untuk membuat catatan-catatan yang terperinci. oleh karena itu semakin sering dan lama peneliti melakukan penelitian di lapangan maka hasil data yang di dapat juga akan bertambah banyak. Oleh karena itu di perlukan reduksi data untuk memperjelas, memperpendek, membuang yang tidak perlu di pakai, dan mengambil simpulan dari data tersebut.
- c. Penyajian Data. Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Yuni (2011). Tahap terakhir ini yaitu Penarikan kesimpulan. Peneliti Pada saat melakukan pengumpulan data sudah paham dan mengerti semua yang menyangkut dengan pengumpulan data ini, sehingga lebih mudah dalam menarik kesimpulan dan dapat di pertanggung Jawabkan Nantinya.

## D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Peran Pemerintah Lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh di desa Adean

Di desa Adean Kabupaten Banggai Laut, Keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat, karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan ini merujuk pada tugas- tugas pemerintahan



seperti memberikan bantuan kepada para petani dalam rangka pembangunan pertanian. Untuk itu peran pemerintah sangatlah penting dalam melayani dan membantu masyarakat berikut ini beberapa hal yang mencakup pentingnya pemerintah yaitu :

- a. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melayani petani dalam artian pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membantu petani dalam mengembangkan produksi pertanian, karena kedepannya pertanian sangat di butuhkan.
- b. Pemerintah ada untuk melindungi dan membantu para petani dari ketidakadilan di dalam berdagang serta memperdayakan masyarakat agar menjadi mandiri.

Dalam Hal ini Pemerintah Telah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya dalam Memperdayakan Petani Cengkeh seperti :

- 1) Pembagian bibit Cengkeh
- 2) Memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada para petani cengkeh tentang bagaimana cara pemupukan tanaman cengkeh serta jenis-jenis pupuk yang di gunakan dan lain-lain.

Ada aturan-aturan dalam pemerintahan yang mengikat yang di sebut dengan regulasi, di mana masyarakat tersebut untuk mengikuti aturan-aturan yang di buat untuk mencapai tujuan bersama artinya masyarakat menyepakati serta terikat untuk mengikuti aturan yang sudah di buat oleh pemerintah, masyarakat akan kena sanksi apabila melanggar regulasi. Arahan di dalam regulasi dalam pelayanan pertanian, di situ pemerintah harus melaksanakan, serta memantau peraturan dalam system pelayanan pertanian, pemerintah juga merinci rencana- rencana keseluruhan system

pertanian. sebagai regulator, pemerintah melaksanakan, serta mengawas serta menjamin agar pelayanan pertanian di dalam organisasi memberikan pelayanan yang baik dan bermutu.

## **2. Pelayanan**

Pelayanan mencakup pelaksanaan tugas Negara dalam melayani warga Negara melalui organ pemerintah dan aparat pemerintah. Aparat menjalankan amanah yang tertuang dalam undang-undang dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran warga Negara Indonesia. Pelayanan dapat di kategorikan sebagai upaya dalam menyiapkan, menyediakan, atau menguruskepentingan warga masyarakat.

Peran pemerintah untuk melayani public sangat besar tujuan di bentuknya pemerintah berkaitan erat dengan fungsi pelayanan yang di laksanakan oleh pemerintah masa sekarang. Sejalan dengan pernyataan rasyid (1997) yang menjelaskan bahwa pemerintah di bentuk secara utama bertujuan bertujuan untuk mengawasi system ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupannya dalam keadaan yang wajar. Rasyid (1997) menegaskan bahwa pelayanan pada hakikatnya merupakan satu dari tiga fungsi wajib pemerintahan, di samping fungsi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seorang aparat pemerintah di nyatakan berhasil dalam melaksanakan misi pemerintahan dapat di lihat dari kemampuannya dalam menjalankan tiga fungsi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah adalah suatu institusi yang menjalankan tugas Negara “pemerintah merupakan seluruh alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara (Ndraha,1990). Dalam pelayanan terdapat asas-asas yang harus di jadikan pedoman oleh aparat pemerintah yaitu :



1. Kepentingan umum.  
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian hukum.  
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan Hak.  
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
4. Keseimbangan Hak dan kewajiban pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus di laksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
5. Keprofesionalan.  
Pelaksana pelayanan harus sesuai dengan kompetensi dan bidang tugas
6. Partisipatif.  
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan Negara yang adil
8. Keterbukaan.  
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang di inginkan

Bentuk pelayanan yang di terimah oleh masyarakat dari pemerintah dapat di kelompokkan kedalam beberapa jenis pelayanan yaitu :

1. Pelayanan barang. Merupakan pelayanan dimana outputnya adalah berbagai bentuk atau jenis barang yang di perlukan oleh masyarakat
2. Pelayanan jasa. Merupakan pelayanan di mana outputnya berbagai

bentuk jasa yang di perlukan oleh masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah adalah pelayanan satu atap. Yang di keluarkan oleh menteri pemberdayaan aparatur Negara (menpan) melalui surat keputusan menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang pedoman pelaksana pelayanan satu atap antara lain di sebutkan bahwa dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang. Aparatur Negara dalam hal ini dititikberatkan kepada aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan barang dan jasa. Pemerintah menjadi tempat penyedia pelayanan public yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Maksud dari pelayanan ini adalah bagaimana pemerintah menjadi atau berperan menjadi fasilitator atau menjembatani petani cengkeh yang berada di desa adean kabupaten banggai laut sehingga masyarakat bisa menambah pengetahuan mereka mengenai cara menanam cengkeh yang benar dan baik. Agar tanaman cengkeh yang di hasilkan bisa menjadikan mereka sejahtera dalam produktivitas pertanian cengkeh.

### **3. Pemberdayaan**

Pemahaman tentang pentingnya proses pemberdayaan maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses itu sendiri menurut rahayu dan budi (2013) pemberdayaan bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipiell dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan

atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Pemberdayaan jg di arahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang mengarah pada kemauan dalam mengembangkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan untuk kesejahteraan (Ristianasari, muljono and S. Gani, 2013). Pemberdayaan sangat menekankan pada proses mendorong/memotivasi setiap individu agar memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dengan demikian, pemberdayaan ini merupakan partisipasi Aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur, sehingga pemberdayaan menjadi upaya korektif terhadap konsep pemberdayaan yang pasif itu. Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri setiap individu dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada. Seperti halnya pemberdayaan merupakan proses pribadi karena masing-masing pribadi mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap dunia tempat mereka tinggal. Pemberdayaan di artikan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis. Menurut Sidiq dan Resnawaty (2017) partisipasi masyarakat merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pilihan strategi yang tepat di harapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat (Noor, 2011). Selain itu strategi yang dapat di lakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses

pemberdayaan di perlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pemberdayaan. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah berperan aktif untuk mendorong serta membantu para petani dalam hal pemberdayaan agar produktivitas pertanian terutama cengkeh bisa mensejahterakan petani. Pemerintah daerah harus bisa membuat berbagai sosialisasi agar bisa menyadarkan petani-petani cengkeh yang baru maupun yang sudah berpengalaman agar lebih paham lagi dalam mengelolah Tanaman cengkeh.

#### **4. Faktor Pendukung**

Adalah yang memuat semua faktor yang sifatnya ikut mendorong. Serta mendukung pelaksanaan dan jalannya program, Faktor pendukung akan berpengaruh terhadap proses pemberdayaan petani cengkeh. Faktor pendukung juga ikut berperan dalam perilaku individu maupun kelompok, demi jalannya program yang di laksanakan agar berjalan dengan Baik.

#### **5. Faktor Penghambat**

Adalah faktor yang menghambat atau menghalangi jalannya suatu hal atau suatu program yang di jalankan. Faktor penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti yang berbeda yaitu faktor dan penghambat. Faktor menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu.

Adapun arti kata penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat, menurut kamus besar bahasa Indonesia kata penghambat di terjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang membuat

(Merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah suatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal kemudian arti dari kata hambat yang menjadi kata dasar Penghambat memiliki arti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar berdasarkan kutipan di atas dapat di Tarik kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu, Sehingga di perlukanantisipasi dan di kurangi agar tidak mengganggu jalannya suatu program pemberdayaan petani cengkeh yang di laksanakan.

## **6. Tata Niaga Pertanian Cengkeh**

Dampak dari pada tata niaga cengkeh di desa adean yaitu 2 tahun terakhir ini hasil panen cengkeh hanya sedikit petani cengkeh yang menikmati hasil panennya, itu sangat berdampak pada kebutuhan pendapatan ekonomi petani cengkeh, apalagi pada saat masa panen cengkeh, harga cengkeh relative rendah, dan setelah cengkeh sudah tidak ada sudah habis masa panennya, barulah harga cengkeh naik. Tataniaga merupakan salah satu aspek yang menekankan bagaimana suatu produksi dapat sampai ke tangan konsumen. Rahadi,(1993) menyebutkan bahwa tataniaga dapat di katakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil produksi kepada konsumenn dengan biaya semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembgian keuntungan yang adil dari keseluruhan harga yang di bayar konsumen kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi tataniaga. Kohls dan uhl (1985) mendefinisikan bahwa, tataniaga pertanian merupakan keragaman dari semua aktivitas bisnis dalam aliran barang atau jasa komoditas

pertanian mulai dari tingkat produksi (petani) sampai konsumen akhir, yang mencakup aspek input dan output pertanian. Kohls dan Uhl (1985) menggunakan beberapa pendekatan dalam menganalisis sistem tataniaga yaitu :

1. Pendekatan Fungsi (The Fungsional Approach) Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui fungsi tataniaga apa saja yang dijalankan oleh pelaku yang terlibat dalam tataniaga. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi pertukaran (pembelian dan penjualan), fungsi fisik (penyimpanan, transportasi, dan pengolahan) dan fungsi fasilitas (standarisasi, resiko, pembiayaan, dan informasi pasar)

2. Pendekatan Kelembagaan (The Institutional Approach) Merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengetahui berbagai macam lembaga atau pelaku yang terlibat dalam tataniaga. Pelaku-pelaku ini adalah pedagang perantara (merchant middleman) yang terdiri dari pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pedagang spekulatif, agen, manufaktur, dan organisasi lainnya yang terlibat.

3 Pendekatan Sistem (The Behavior System Approach) Merupakan pelengkap dari pendekatan fungsi kelembagaan untuk mengetahui aktivitas-aktivitas yang ada dalam proses tataniaga, seperti perilaku lembaga yang terlibat dalam tataniaga dan kombinasi dari fungsi tataniaga. Indonesia adalah Negara penghasil cengkeh terbesar di dunia, pada tahun 2010 indonesia memiliki 456.000 hektar lahan cengkeh, dengan produksi mencapai 140.000 metrik ton. Cengkeh (*syzygium aromaticum*, syn).

## **7. Peran pemerintah Menurut Gede Diva (2009)**

a) Peran pemerintah sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi semua program untuk mencapai tujuan. Misalnya dengan memberikan pelatihan, dalam konteks fasilitasi tersebut pemerintah dapat berupa, pertama, pemerian sesuatu yang baik yang berupa uang atau subsidi barang atau jasa. Kedua, keistimewaan baik yang berupa keringanan atau kekuatan dalam waktu lintas hukum. Ketiga, bijaksana yang tersendiri.

b) Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah memberi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya.

c) Peran pemerintah sebagai katalisator

Secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. pemerintah daerah terkadang ikut terlibat dalam proses tersebut namun tidak terlibat dalam mengatur keseluruhan proses perubahannya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam keseluruhan proses perubahannya tidak boleh dilakukan karena keterlibatan peran pemerintah terlalu banyak dalam kegiatan perekonomian akan

menyebabkan perekonomian menjadi tidak efisien lagi sebab pasar tidak dapat bergerak lagi secara alami.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan Berdasarkan pembahasan dari permasalahan di Atas mengenai peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh di desa adean kabupaten banggai laut yaitu :

a. Pemerintah sudah menjalankan perannya dalam memperdayakan masyarakat tidak hanya petani cengkeh tetapi petani-petani lainnya dengan Program pembagian berbagai macam bibit pertanian salah satunya bibit cengkeh, serta mengadakan pembinaan, pelatihan serta penyuluhan kepada petani cengkeh agar dapat berinovasi, membuat regulasi, serta memberikan pelayanan dan juga memberdayakan masyarakat petani agar dapat merubah taraf hidup mereka.

b. Dalam pelaksanaan pemberdayaan petani di desa adean kabupaten banggai laut petani cengkeh di ajarkan cara membuat pupuk, Cara pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Namun dalam setiap pemberdayaan tidak lepas dari faktor yang membuat pemberdayaan berjalan dengan baik maupun berjalan dengan tidak baik.

### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai peran pemerintah lokal dalam pemberdayaan petani cengkeh di desa adean, maka dari itu penulis ingin memberikan saran yang mungkin bisa bermanfaat untuk pemerintah dalam rangka peningkatan dan pengembangan SDM khususnya di desa adean kabupaten banggai laut. Saran yang saya ajukan dalam rangka Penyelesaian permasalahan tersebut untuk itu, pemerintah bisa lebih

Terfokus untuk mengupayakan kesejahteraan petani cengkeh dengan cara membuat lagi berbagai strategi atau konsep pertanian secara Kukuh atau mantap karena semakin meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan petani cengkeh maka perkembangan produksi cengkeh akan meningkat. Adapun saran yang penulis sampaikan kepada pemerintah dan juga petani cengkeh adalah sebagai berikut :

- a. Saran untuk pemerintah Sebaiknya pembagian bibit cengkeh harus di sesuaikan dengan banyak nya petani cengkeh agar semua petani cengkeh bisa mendapatkan bibit cengkeh secara merata. Serta pemerintah bisa lebih fokus dalam mensejahterakan petani cengkeh karena semakin meningkatnya kesejahteraan petani cengkeh maka produktivitas pertanian cengkeh akan ikut Naik.
- b. Saran Untuk Masyarakat petani cengkeh Masyarakat adalah pihak yang di berdayakan, maka dari itu masyarakat petani Cengkeh harus lebih peka lagi jika ada informasi yang menyangkut pertanian khususnya tanaman cengkeh, agar masyarakat petani tidak ketinggalan informasi jika ada penyuluhan atau apapun itu yang menyangkut dengan pertanian.

### Daftar Pustaka

- Adiwilaga, R. (2018). *System Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Arwati, S. (2018). *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Makassar: CV Inti Mediatama .
- Bahua, M. I. (2016). *Kinerja Penyuluh Pertanian*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Sidoarjo: Uais Inspirasi Indonesia.
- Domai, T. (2011). *Desentralisasi Paradigma Baru Dalam Pemerintah Lokal Dan Hubungan Antar Pemerintah Daerah*. Malang: Elektronik Pertama Dan Terbesar Di Indonesia .
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Mecca.
- Handoko, S. Y. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Malang: UB Press.
- Harini, R. (2020). *Tinjauan Spasi Optimis Produksi Pertanian Pada Wilayah Perbatasan* . Yogyakarta : Gadj Mada University Press.
- Harini, R. (2020). *Tinjauan Spasial Optimasi Produksi Pertanian Pada Wilayah Perbatasan*. Yogyakarta : Gadj Mada University Press.
- Ilmar, A. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan* .
- Indarti, N. (2020). *Pedoman Pelatihan Industri Kecil Menengah*. Pasuruan: Lembaga Academic.
- Jakarta: Kencana.
- Maryani, D. R. (2019). *Pemberdayaan*

*Masyarakat.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Muta'ali, L. (2019). *Dinamika Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah Di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Nugroho, S. S. (2020). *Hukum Untuk Petani Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Era Globalisasi.* Klaten: Lakeisha.